




Research Article

Demokrasi dalam Bayang Bayang Dinasti Politik

Elly Warnisyah Harahap¹, Mhd. Syaikah Widya Syahr², Thorino Ivan Doloksaribu³, Ummi Al-Fiqro Napitupulu⁴, Naila Hadisty Ananta⁵, Ahmad Afriza⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

1. E-mail: ellywarnisyahharahap@uinsu.ac.id 
2. E-mail: syaikah579@gmail.com
3. E-mail: thorinodoloksaribu@gmail.com
4. E-mail: naylahadistyananta@gmail.com
5. E-mail: alfikanapitupulu@gmail.com
6. E-mail: ahmadafriza982@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 15, 2024
Accepted : March 12, 2025

Revised : February 27, 2025
Available online : April 16, 2025

How to Cite: Elly Warnisyah Harahap, Mhd. Syaikah Widya Syahr, Thorino Ivan Doloksaribu, Ummi Al-Fiqro Napitupulu, Naila Hadisty Ananta and Ahmad Afriza (2025) "Democracy in the Shadow of Political Dynasties", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 321-329. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1449.

Democracy in the Shadow of Political Dynasties

Abstract. Democracy is a form of government in which all eligible citizens have equal rights in the decisions of their lives. The main principles of democracy include freedom, equality and justice. A democratic government provides a way for people to participate in freedom, equality, justice in politics, such as participating in elections, being given freedom of opinion and other things. Politics is an activity or process related to decision-making or regulation in a group or society. It involves the formation and

implementation of public policy, the division of power, and the interaction between individuals, groups, and institutions. Political dynasty refers to a situation in which power is inherited from generation to generation in a particular family. The purpose of this research is to take Ahmad Ibn Hambal and Ibn Taymiyyah's thoughts on democracy in the shadow of political dynasties. This research uses quantitative methods with collection and uses literature studies. Democracy in the shadow of political dynasties can create a concentration of power and limit access and political opportunities for others in society.

Keywords: Democracy, Politics, Political Dynasties, Thoughts Ahmad Ibn Hambal And Ibn Taymiyyah

PENDAHALUAN

Dalam konteks demokrasi yang sehat, penting untuk memastikan adanya mekanisme yang mencegah dominasi dinasti politik, seperti batasan masa jabatan, transparansi dalam pemilihan, independensi lembaga-lembaga pengawas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, demokrasi dapat berfungsi dengan baik sebagai sistem yang mewakili kepentingan semua warga negara dan memastikan akuntabilitas pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Di Indonesia juga terdapat beberapa kasus dinasti politik contoh di calonkannya Gibran Rakabuming yang merupakan anak dari Presiden ke-7 yang naik dalam pemilihan Presiden periode 2024-2029 (Ghafur, 2011).

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu "Demos" dan "Kratos". Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi mencerminkan evolusi konsep pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demokrasi telah mengalami perubahan dan tantangan sepanjang sejarahnya, nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan tetap menjadi landasan utama dari sistem demokrasi. Demokrasi juga telah berkembang dan menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun demokrasi memiliki berbagai bentuk dan varian, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi terus beradaptasi dengan zaman dan tantangan yang dihadapi, tetapi tetap menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling dihormati dan diinginkan oleh banyak orang (Hanafi, 2018).

Masuknya demokrasi ke Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, ketika anak-anak muda dan mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di Eropa mulai membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta berpartisipasi dalam diskusi terbuka. Mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia yang masih mengalami penjajahan Belanda. Mohammad Hatta, yang kelak menjadi Wakil Presiden Indonesia, belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Ide-ide demokrasi ini kemudian meresap di benak anak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan (Ekawati et al., 2020).

Indonesia merupakan negara demokrasi sejak awal berdirinya tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses kerjanya, presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal itu berarti, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat melalui pemilu. Pada tahun 1956, diadakan pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Demokrasi ini yaitu Demokrasi Pancasila. Setelah usai Demokrasi Pancasila ini, dilanjutkan oleh masa pemerintahan Soeharto yang menyelaraskan Demokrasi yang pertama. Dan dilanjutkan Demokrasi yang kedua pada tahun 2004 hingga saat ini (Suhaimi, 2021).

Dalam konteks politik dinasti, demokrasi dapat dihubungkan dengan konsep kekuasaan dan kepatuhan. Dalam beberapa budaya dan tradisi, kekuasaan dapat dipegang oleh keluarga atau dinasti yang telah lama berkuasa, dan kepatuhan dapat diharapkan dari rakyat. Dalam Islam, kekuasaan dapat dipegang oleh penguasa yang dipilih oleh Allah, dan kepatuhan dapat diharapkan dari rakyat terhadap hukum Allah (Adnan, 2021).

Dalam kaitannya dengan demokrasi, beberapa ulama Islam seperti Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang berbeda. Ahmad bin Hambal, seorang ulama Sunni yang terkenal dengan karyanya tentang hukum Islam, berpendapat bahwa kekuasaan harus dipegang oleh penguasa yang dipilih oleh Allah, dan kepatuhan harus diharapkan dari rakyat terhadap hukum Allah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama Sunni lainnya, berpendapat bahwa kekuasaan harus dipegang oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan kepatuhan harus diharapkan dari rakyat terhadap hukum Allah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan untuk menganalisis pandangan Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah tentang demokrasi dalam konteks politik dinasti (Aminah & Rokan, 2019). Kami akan membandingkan pandangan mereka dengan konsep demokrasi yang umum diterima dalam budaya Barat dan Islam, serta menganalisis implikasi dari pandangan mereka terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan politik dalam budaya Islam. Kami berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang demokrasi dalam budaya Islam dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan politik dalam budaya Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demokrasi dalam Polemik Dinasti Politik

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi yang di mana kekuasaan tertinggi di pegang oleh rakyat, rakyat ikut ambil peran dalam pemerintahan yang bersifat demokrasi ini, dalam pembahasan ini kami akan menjelaskan bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dinamika demokrasi yang berkembang di Indonesia mulai terjadi pada awal abad ke-20. Anak-anak Nusantara yang berkenalan dengan pengetahuan modern mulai tertarik dengan demokrasi. Demikian pula kebijakan pemerintah kolonial yang mulai

mengintroduksi elemen-elemen demokrasi, walaupun dalam konteks yang terbatas pada awal abad ke-20 (Alauddin & Akbar, 2021).

Dalam konteks tersebut secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia banyak di pengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi dari luar Indonesia. Memang, sebagai suatu praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi sudah diterapkan oleh Sebagian masyarakat di nusantara ini jauh sebelum berinteraksi dengan bangsa barat. Proses pemilihan kepala suku dan pemilihan kepala desa di berbagai wilayah nusantara menunjukkan hal tersebut melalui konsep *primus inter pares* (yang dulu sering di sebut dengan istilah desa demokrasi). Namun karena pemerintahan yang besar, yaitu kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak menerapkan pemerintahan yang demokratis, sering kali kita merasa bahwa seolah demokrasi tidak pernah ada di Indonesia (Anggra & Suryanef, 2022).

Indonesia sendiri mengalami pembaruan politik mendasar sejak tahun 1998, menandai berakhirnya dua bentuk sistem otoriter sebelumnya: Orde Lama dan Orde Baru. Meskipun secara formal-konstitusional, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan politik Indonesia sudah ada sejak zaman kemerdekaan menganut asas kedaulatan rakyat, tetapi interupsi dua sistem otoriter tersebut, yang secara keseluruhan berlangsung hampir empat dekade, telah menguburkan prinsip kedaulatan rakyat secara substansif (Buhungo et al., 2024). Berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998 dan berawalnya apa yang disebut era reformasi telah menandai semangat baru dan tekad yang kuat untuk mewujudkan kehidupan politik yang benar benar demokratis serta reformasi di bidang-bidang lain. Ini berarti, demokrasi bagi bangsa Indonesia bukan lagi menjadi konsep secara ilmiah di lingkungan terbatas, tetapi sudah menjadi kebutuhan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Kecenderungan proses demokratisasi di Indonesia sampai sekarang ini masih berkuat dengan pengaturan-pengaturan formal-prosedural tidak menghilangkan fakta, demokrasi sudah menjadi fenomena yang mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari (Prasetyo, 2023).

Di pihak lain, kecenderungan menerima begitu saja proses demokratisasi di atas, yang di sertai dengan slogan-slogan yang akrab di telinga, masyarakat umum seperti reformasi, keterbukaan, dan semacamnya, mengabaikan kita dari bersikap kritis. Pengalaman tertekan selama empat dekade di bawah pemerintahan otoriter tampaknya mendorong bangsa Indonesia untuk dengan tangan terbuka menyambut era demokratisasi sehingga tidak banyak pemikir atau peminat yang mencoba mengkajinya secara kritis (Hafsari et al., 2022). Salah satunya adalah asumsi, tujuan akhir kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk menyejahterakan rakyat, yang tujuan tersebut hanya akan tercapai bila rakyat diberi hak-hak politik untuk memilih pemimpin yang akan menentukan kehidupan mereka (Bakar, 2013).

Demokrasi yang dibawa pemuda abad ke-20 merupakan demokrasi barat yang dimana demokrasi tersebut mempunyai sistem kapitalis. Seperti pendapat dari Hatta: "Jadinya demokrasi Barat yang dilahirkan oleh revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi, yang memakai dasar

bahwa segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga” (Adnan, 2021).

Kedinastian politik pernah terjadi pada zaman setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan, yang di kenal dengan monarkiheriditis (kerajaan turun-temurun) meniru sistem pemerintahan di Persia dan Byzantium. Muawiyah dalam memimpin masih tetap menggunakan istilah khalifah, namun ia memberikan interpretasi baru di dalamnya untuk mengagungkan jabatan tersebut. Ia menyebutnya “Khalifah Allah” dalam pengertian penguasa yang di angkat oleh Allah. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya menyatakan setia kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa orang yang menyarankan gagasan tersebut adalah Mughirah bin Syu’bah. Muawiyah bin Abu Sufyan dianggap telah meninggalkan tradisi pemilihan khalifah selama masa Khulafaur Rasyidin, di mana pemilihan di tetapkan oleh umat Islam yang dilandasi dengan musyawarah dan bai’at (Syauket & Wijanarko, 2021).

Dengan segala usaha Muawiyah meyakinkan masyarakat untuk menerima idenya, mengangkat Yazid melalui motivasi ataupun ancaman. Motif yang mendasari Muawiyah melimpahkan kekuasaan kepada Yazid putranya, bukan orang lain, adalah demi kepentingan umum yaitu persatuan dan kesatuan rakyat. Dengan ini Muawiyah juga hidup sebagai Raja yang memiliki tahta dan istana tidak hanya sekedar khalifah seperti masa Khulafaur Rasyidin. Terhadap keluarga besar Bani Umayyah, Muawiyah mampu menyatukan barisan keluarganya dengan sifat-sifat dan keahliannya dalam memimpin. Walaupun keluarga Bani Umayyah tidak memiliki peranan penting dalam pengelolaan negara, Muawiyah tidak meninggalkan keluarga besarnya (Nurcahyo, 2016).

Muawiyah memilih orang-orang dari kalangan kapabel dan memiliki loyalitas tinggi sebagai Gubernur di daerah, namun Muawiyah juga tetap memilih sebagian orang-orangnya dari keluarganya dan menyerahkan beberapa tugas kepada mereka. Ia berhati-hati terhadap kemungkinan kekuatan mereka yang dapat mengancam kekuasaannya sambil memastikan kemampuan dan hasil kerja yang dimiliki. Biasanya Muawiyah menguji mereka menjadi pemimpin di daerah kecil. Jika nampak kemampuan dan kewibawaannya, ia mengangkatnya untuk memimpin kota yang penting. Ia memisahkan satu dengan yang lain secara berjauhan, untuk menghindari adanya perselisihan (Ghafrin & Syauqii, 2024).

Di Indonesia juga mengalami masa kedinastian politik, yaitu pada masa Presiden Soeharto di mana pada masa pimpinan itu keluarga soeharto tidak hanya fokus dalam hal politik saja. Mereka juga membangun dan memperbesar bisnis di dalam maupun di luar Indonesia. Pada masa Orde Baru, Soeharto kerap membawa anak-anaknya masuk ke dalam lingkaran politik. Siti Hardiyanti Rukmana misalnya, menjabat sebagai anggota MPR RI dari fraksi Partai Golkar periode 1992-1998 dan menjadi Menteri sosial tahun 1998. Beberapa kerajaan bisnis keluarga cendana yaitu property dan perkebunan, media, konstruksi, taman wisata, supermarket, resort mewah, kilang minyak dan energi (Zahra, 2020).

Dan pada masa ini juga terjadi dinasti politik dalam pemerintahan Presiden ke-7, dimana anak dan menantunya ikut terjun dalam dunia politik. Seperti Gibran Rakabuming Raka yang pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan menjadi Wakil Presiden terpilih pada pemilu tahun 2024, kemudian Bobby Nasution terpilih sebagai Walikota Medan pada tahun 2021, dan terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi secara terang-terangan haus dalam kekuasaan, yang dimana sebelum masa jabatannya berakhir, Anak dan Menantunya turun kedalam dunia politik. Jokowi juga secara terang-terangan mendukung atau berkampanye dalam pemilihan anak dan menantunya (Effendi, 2018).

Jika dikatakan demokrasi adalah sebuah kebebasan bersama, apakah bisa dikatakan telah terjadi sebuah dinasti politik? Terselubungnya istilah Human Rights menjadi selimut empuk bagi para pelaku dinasti politik. Human Rights merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Hak ini berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Terus kenapa mereka dikatakan sebagai dinasti politik dan merusak demokrasi di Indonesia?

Pembahasan yang lebih dalam, alasan dinasti politik dikatakan sebagai polemik demokrasi. Karena faktanya demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, beberapa lembaga independent menyebutkan demokrasi Indonesia mengalami penurunan, indeks demokrasi Indonesia versi *Economist Intelligence Unit* (EIU) tergolong cacat (*flawed democracy*) yaitu pada posisi 6,71 poin pada tahun 2022. Berdasarkan data Freedom House indeks demokrasi Indonesia turun, saat ini berada di angka 53 poin pada tahun 2023, data Reporter Without Borders (RSF) pada angka 54,83 poin pada tahun 2023 (Heriyanto, 2022).

Puncaknya baru-baru ini Indonesia mendapat sorotan tajam dari United Nation *Human Rights Committee*, dalam siaran pers 28 Maret 2024 mengungkap temuan berisi keprihatinan atas implementasi negatif dari ICCPR, Indonesia mendapat sorotan terkait pelanggaran hak sipil dan politik, adanya pengaruh yang tidak semestinya terhadap jalannya pemilu 2024, yakni keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan syarat usia minimum kandidat dan menguntungkan putra presiden (Djati, 2013).

Permasalahan tentang pencalonan Gibran dimana ada kejanggalan tentang pengubahan Batasan umur pencalonan. Setelah Gibran melakukan pendaftaran, Mahkamah Konstitusi melanggar Etika dalam UU Batasan umur pencalonan. Dan seharusnya pencalonan Gibran tidak sah, KPU dan BAWASLU belum melakukan perubahan terhadap UU Batasan umur pencalonan (Rahmawati, 2017).

Dalam hal ini MK telah melanggengkan politik Dinasti dengan putusan terhadap gugatan batas usia capres cawapres tersebut. Sebab keputusan yang diambil oleh MK sangat mengakomodasi kepentingan putra Presiden ke-7, Gibran untuk maju dalam pemilu 2024. Feri Amsari dari Universitas Andalas, menyatakan bahwa konstitusi Indonesia tidak dirancang untuk mengakomodasi kepentingan politik keluarga tertentu. Dia mengkritik fenomena politik dinasti sebagai bentuk nepotisme yang bisa membahayakan tatanan demokrasi, mengingat konstitusi harusnya mencegah kekuasaan terpusat pada satu keluarga (Tanjung & Faizal, 2021).

Kedua contoh tersebut menunjukkan adanya praktik dinasti politik di mana kekuasaan politik diwariskan atau didukung di dalam keluarga yang sama. Ini dapat mengurangi prinsip meritokrasi dan demokrasi karena posisi kekuasaan didominasi oleh keluarga tertentu. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2020. Pada 2023, muncul wacana bahwa Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden Indonesia untuk periode mendatang. Ada kesamaan dalam hal nepotisme, yaitu memberikan posisi penting kepada anggota keluarga, yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik dan kepemimpinan yang ada. Baik Muawiyah maupun Jokowi menghadapi kritik dan kontroversi terkait dengan tindakan mereka. Kritik utamanya adalah bahwa tindakan tersebut mungkin tidak adil dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan pemimpin.

Human Rights seharusnya memberikan kualitas lebih untuk demokrasi, bukan melemahkan demokrasi dan menjadi cap buruk untuk keberlangsungan pemerintahan di Indonesia. Bayang-bayang dinasti politik mengubah Indonesia menjadi Dark Democracy, dan membutuhkan rakyat terhadap pentingnya pembatasan kekuasaan agar menjadi demokrasi yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Demokrasi dalam bayang-bayang dinasti politik menciptakan paradoks di mana nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, partisipasi publik, dan persaingan yang sehat dihambat oleh praktik nepotisme dan kekuasaan yang terkonsentrasi dalam keluarga atau kelompok tertentu. Dinasti politik cenderung memperkuat kekuasaan melalui mekanisme yang tidak selalu transparan dan dapat memanipulasi sistem demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga merusak integritas dan legitimasi proses demokrasi. Meskipun dinasti politik bisa menawarkan stabilitas politik dalam jangka pendek, dalam jangka panjang mereka dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sejati dan menekan munculnya pemimpin-pemimpin baru yang kompeten. Untuk memperkuat demokrasi, diperlukan langkah-langkah yang memastikan bahwa proses politik tetap adil dan terbuka bagi semua warga negara tanpa diskriminasi atau dominasi oleh keluarga atau kelompok tertentu.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus utama penelitian ini adalah pada kasus-kasus tertentu dari dinasti politik di Indonesia, sehingga hasil dan kesimpulannya mungkin tidak sepenuhnya berlaku di konteks politik yang berbeda. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada periode dan sumber tertentu, yang mungkin tidak mencakup dinamika terbaru atau perubahan dalam politik dinasti. Ketiga, penelitian ini lebih banyak mengandalkan analisis kualitatif dan kurang menyertakan data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas dan metodologi yang lebih beragam sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dinasti politik terhadap demokrasi di berbagai konteks.

BIBLIOGRAPHY

- Adnan, M. (2021). Di Bawah Bayang-Bayang Syariat: Islam, Islamisme dan Demokrasi di Kota Surakarta. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 46–67. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.46-67>
- Alauddin, M. A., & Akbar, R. D. (2021). Di Balik Realitas Semu: Studi Kritis Ideologi dan Kuasa Politik Jawa di Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(2).
- Aminah, S., & Rokan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Kencana Prenada Media Group.
- Anggra, B. N., & Suryanef, S. (2022). Politik Kekerabatan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tanjung Pauh Mudik. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1230–1241. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7214>
- Bakar, A. (2013). Politi Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2(1), 105–119.
- Buhungo, R., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Urgensi dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan dalam Partai Politik untuk Calon Anggota Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 14–25. <https://doi.org/10.62383/ALIANSI.V1I4.248>
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(2), 203–231. <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i2.1234>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 2(2), 233. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- Ekawati, E., Sweinstani, D., & Mouliza, K. (2020). Dampak Personalisasi Partai terhadap Demokrasi Internal Partai di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Wacana Politik*, 5(2).
- Ghafrin, Z., & Syauiqii, F. (2024). Analisis Kritis Perang Umat Islam Masa Nabi Sampai Dinasti Bani Abbasiyah: Dari Pertahanan Diri Menjadi Perang Saudara. *Islamic Education*, 4(1), 12–24.
- Ghafur, F. (2011). Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Penelitian Politik*, 151–158.
- Hafsari, I., Andriyani, L., & Setiawan, A. (2022). Rekrutmen Partai Politik dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten. *Integralistik*, 33(2), 90–99. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i2.37725>
- Hanafi, I. (2018). Agama dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 48–67.
- Heriyanto, H. (2022). Dinasti Politik pada Pilkada di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 29–46.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(01), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>

- Prasetyo, S. (2023). "Neo KKN" dan Tantangan Demokratisasi Indonesia dalam Pendekatan Oligarki. *GLOBAL INSIGHT JOURNAL*, 8(1), 45-56. <https://doi.org/10.52447/gij.v8i1.7025>
- Rahmawati, A. D. (2017). Representasi Klebun Perempuan dalam Perspektif Patriarki dan Dinasti Politik di Madura. *Ethnicity And Globalization*, 151-359.
- Suhaimi, E. (2021). Implikasi Politik Ambang Batas Pencalonan Pejabat Publik Terhadap Penyelenggaraan Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 111-128.
- Syauket, A. S., & Wijanarko, D. (2021). Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1).
- Tanjung, M. A., & Faizal, F. (2021). Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 144. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2739>
- Zahra, E. F. (2020). Kepemimpinan Perempuan Di Balik Bayang-Bayang Patriarki. *International Jurnal Of Demos*, 2(1).